

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Penelitian

*Mandatory disclosure* di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-431/B1/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Dalam aturan SAK konvergensi IFRS juga sudah dijelaskan secara terperinci mengenai item-item pengungkapan wajib. Berdasarkan peraturan yang ada, maka semestinya tingkat *mandatory disclosure* di Indonesia dapat memperoleh hasil yang ideal yaitu 100%. Tetapi pada kenyataannya bahwa peraturan yang ada tidak menjamin terealisasinya praktik *mandatory* yang lebih tinggi. Pernyataan tersebut terbukti dengan hasil penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) menemukan bahwa rerata tingkat kepatuhan masih rendah, yaitu sebesar 37,000%. Prawinandi, dkk (2012) menemukan berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan yaitu tingkat kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS sebesar 69,900%. Utami, dkk (2012) mendapatkan hasil penelitian yang lebih besar mengenai *mandatory disclosure* di Indonesia baru mencapai 72,203%. Supriyono, dkk (2014) membuktikan bahwa tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS untuk industri perbankan di Indonesia memiliki rerata 75,92%.

Fenomena yang terkait dengan *mandatory disclosure* terjadi pada kasus tahun 2009 menimpa perusahaan BUMN yaitu PT. Waskita Karya yang

melakukan kelebihan pencatatan laba bersih pada laporan keuangan 2004-2008 sekitar Rp 400 miliar. Laba yang seharusnya masuk pembukuan tahun depan dicatat sebagai laba tahun lalu. Kasus lainnya yaitu pada PT. Bakrieland Development Tbk (ELTY) tahun 2013 yang tidak mengungkapkan kewajiban jangka panjang yang sebenarnya. Perusahaan memiliki hutang obligasi sebesar US\$ 155 juta dan tidak dapat membayarnya saat jatuh tempo. Akhirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendesak agar perusahaan segera memberikan laporan terbuka kepada publik, karena sebagai perusahaan terbuka seharusnya mengungkapkan semua informasi yang terkait dengan perusahaan.

Dari fenomena diatas dapat dikatakan bahwa PT. Waskita Karya dan PT. Bakrieland Development menimbulkan ketidakpercayaan dari pengguna laporan keuangan dan mempertanyakan integritas laporan keuangan yang disajikan. PT. Waskita Karya tidak menyajikan laba perusahaan yang sebenarnya dan PT. Bakrieland Development tidak secara terbuka mengungkapkan kejadian yang ada di dalam perusahaan. Integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan keadaan suatu perusahaan yang sebenarnya, tanpa ada yang ditutup-tutupi (Hardiningsih, 2010).

Pengungkapan terbagi menjadi dua: pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Adina dan Ion (2008) menjelaskan bahwa tujuan daripada *mandatory disclosure* yaitu untuk membantu mengakomodasi dalam melengkapi sarana informasi bagi pengguna laporan keuangan, menentukan penanganan bobot kinerja dengan taat kepada

aturan hukum dan SAK yang berlaku. Pengungkapan yang tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan akan meminimalisir ketidakpastian yang dihadapi investor. Daske dan Gedhardt (2006) menemukan bahwa penerapan IFRS di berbagai negara dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan informasi keuangan perusahaan.

Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Pengungkapan yang tinggi akan berpengaruh terhadap *corporate governance*. Oleh sebab itu dibutuhkan beberapa mekanisme institusional yaitu *corporate governance* untuk memantau kinerja manajemen dalam mengatur perusahaan. Menurut Hertanti dalam Prawinandi, dkk (2012), alur metamorfosis sosial masyarakat Indonesia yang mendesak dalam menjalankan prinsip *corporate governance* kepada para pebisnis yang melakukan isu pengungkapan semakin signifikan untuk dikaji karena nilai utama yang ada terdapat pada *corporate governance* yaitu *fairness, responsibility, accountability* dan *transparancy*.

Pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia telah diteliti oleh beberapa peneliti, yang mana struktur variabel dari *corporate governance* yaitu meliputi: (a) ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, kompetensi komite audit (Supriyono, dkk 2014), (b) proporsi komisaris independen (Prawinandi, dkk 2012; Utami, dkk 2012; Supriyono, dkk 2014; Alvionita dan Taqwa 2015; Fauziah, I 2015; Pitasari, dkk 2015; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Hafiz, dkk 2015; Gunawan dan Hendrawati 2016), (c) jumlah rapat dewan komisaris

(Utami, dkk 2012; Supriyono, dkk 2014; Pitasari, dkk 2015; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Hafiz, dkk 2015), (d) jumlah anggota dewan komisaris (Prawinandi, dkk 2012; Hafiz, dkk 2015; Pitasari, dkk 2015; Gunawan dan Hendrawati 2016), (e) latar belakang pendidikan komisaris utama (Prawinandi, dkk 2012; Supriyono, dkk 2014; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Gunawan dan Hendrawati 2016), (f) jumlah rapat komite audit (Utami, dkk 2012; Supriyono, dkk 2014; Fauziah, I 2015; Pitasari, dkk 2015; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Hafiz, dkk 2016), (g) jumlah anggota komite audit (Prawinandi, dkk 2012; Alvionita dan Taqwa 2015; Pitasari, dkk 2015; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Hafiz, dkk 2016; Gunawan dan Hendrawati 2016), (h) proporsi komisaris wanita (Prawinandi, dkk 2012; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Gunawan dan Hendrawati 2016), (i) kepemilikan manajerial (Utami, dkk 2012; Alvionita dan Taqwa 2015; Fauziah, I 2015; Widjayanti dan Wahidawati 2015; Gunawan dan Hendrawati 2016), (j) kepemilikan institusional (Utami, dkk 2012; Alvionita dan Taqwa 2015; Fauziah, I 2015; Widjayanti dan Wahidawati 2015), (k) kepemilikan publik, kepemilikan asing (Alvionita dan Taqwa 2015). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, variabel mekanisme *corporate governance* yang dipilih dalam penelitian ini meliputi: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Supriyono, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Supriyono, dkk

(2013) adalah pada proksi *corporate governance* yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, ukuran komite audit, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan kompetensi komite audit. Pada penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit. Selain itu, perbedaannya terdapat pada jenis perusahaan dan tahun penelitian. Penelitian Supriyono, dkk (2014) pada perusahaan perbankan tahun 2009-2012, sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur tahun 2013-2015.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari peran *corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independent, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris, jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI. Penelitian kali ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan beberapa alasan sebagai berikut: (i) perusahaan manufaktur memiliki kecenderungan untuk menyampaikan lebih banyak pengungkapan kepada pemakai laporan keuangan, dan (ii) perusahaan manufaktur memiliki basis investasi yang luas karena dalam proses operasinya mengandalkan modal dari investor untuk mendapatkan aset tetap (Utami, dkk 2013).

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka penelitian ini akan dilakukan pada struktur *corporate governance* guna untuk mendapatkan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Karena keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, maka struktur *corporate governance* dalam penelitian ini meliputi: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah anggota komite audit.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia?
3. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia?
4. Apakah jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia?

5. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia?
6. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia?

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris, yaitu :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh kepemilikan institusional terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.

6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris tentang pengaruh jumlah anggota komite audit terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu dan wawasan mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perusahaan agar mengetahui tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Pemakai laporan keuangan dapat mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memprediksi kepatuhan perusahaan dalam memberikan pengungkapan wajib.